

No. : 15/Surat Terbuka_JSKK/XI/07

Hal : **Permohonan Audiensi Korban Pelanggaran HAM**
Tuntutan Penuntasan Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS)

Kepada Yth.
Bapak Presiden Republik Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono
di Istana Merdeka

Dengan hormat,

Bapak Presiden yang terhormat, kami para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM telah melakukan empat puluh satu (41) kali aksi diam hitam kamisan di depan Istana. Sebagai bentuk usaha kami untuk melawan impunitas dan menuntut perhatian serta tanggungjawab Bapak Presiden dalam penuntasan pelanggaran HAM; Tragedi 1965/1966, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, 27 Juli 1996, Trisakti, Semanggi I 1998, Semanggi II 1999, Mei 1998, penculikan aktivis 1997/1998, dan pembunuhan aktivis pejuang HAM, Cak Munir, Alas Tlogo, pembunuhan Marsinah dan berbagai kasus pelanggaran HAM lainnya.

Bulan November 2007 dengan semangat hari pahlawan, harusnya menjadi satu momentum bagi Bapak Presiden untuk mengambil sikap terhadap peristiwa pelanggaran HAM. Sembilan tahun yang lalu, pada tanggal 8 sampai dengan 14 November 1998, telah terjadi kekerasan terhadap Mahasiswa yang berdemonstrasi menolak sidang istimewa yang dinilai inkonstitusional. Pada saat itu mahasiswa juga mendesak presiden Habibie untuk mengatasi krisis ekonomi. Namun Aksi tersebut direspon aparat dengan menembakan peluru tajam. Akibatnya 18 orang mahasiswa meninggal, 4 orang diantaranya adalah yaitu Teddy Mardani, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi dan BR Norma Irmawan. Dan sekitar 109 orang mengalami luka-luka, baik masyarakat maupun mahasiswa. Selanjutnya peristiwa ini dikenal dengan Peristiwa Semanggi I. Dan dijadikan satu berkas penyelidikan dengan nama kasus TSS (Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II).

Sembilan tahun peristiwa berlalu, namun sampai hari ini tidak satupun keberpihakan hadir bagi korban dan keluarga korban. Kasus TSS di politisir sedemikian rupa. Sembilan tahun terjadi *ping-pong* tak berkesudahan, rapat BAMUS (Badan Musyawarah) memutuskan menolak menindaklanjuti hasil kajian Komisi III DPR untuk membuka kembali kasus TSS. dan Kejagung menolak menindaklanjuti hasil temuan Komnas HAM yang menyatakan adanya pelanggaran HAM berat pada kasus TSS.

Jika Bapak Presiden pemimpin yang mengedepankan penegakan HAM, sudah seharusnya Bapak mengambil langkah aktif dan strategis dalam persoalan *ping pong* kasus TSS. Dan segera bersedia menerima kami keluarga korban untuk beraudiensi. Sebab penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, penting bagi sejarah dan kebaikan berbangsa dan bernegara di masa mendatang; agar tidak ada sejarah yang gelapkan, dan adanya pelajaran untuk penghormatan HAM dan tidak berulangnya pelanggaran HAM di masa mendatang.

Semoga Bapak Presiden, segera merespon dan bertindak atas tuntutan kami. Demikian surat ini kami sampaikan terimakasih.

Jakarta, 15 November 2007
Presidium JSKK,

Sumarsih
0813-16638655

Suciwati

Bejo Untung

